ABSTRAK

PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENGHENTIAN PENGIRIMAN TENAGA KERJA INDONESIA TERHADAP SIKAP MASYARAKAT

Oleh

(Yesi Suryanti, Berchah Pitoewas, Hermi Yanzi)

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana pengaruh kebijakan pemerintah tentang penghentian pengiriman TKI terhadap sikap masyarakat di Dusun XV Desa Bandar Agung Kabupaten Lampung Timur. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan sampel 33 responden. Menggunakan teknik pengumpulan data angket skala likert, wawancara, dokumentasi dan observasi serta analisis data menggunakan *chi kuadrat.* Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat derajat keeratan, yaitu dengan koefisien kontigensi C= 0,73 dan koefisien kontigensi maksimum C_{maxs}=082 berada pada kategori tinggi dengan jarak interval 0,56-0,83. Artinya ada pengaruh yang signifikan antara kebijakan pemerintah tentang penghentian tenaga kerja Indonesia terhadap sikap masyarakat di Dusun XV Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan beberapa indikator mengenai kebijakan pemerintah tentang penghentian pengiriman TKI dan sikap masyarakat yang meliputi indikator mendukung kebijakan pemerintah tentang penghentian pengiriman TKI cenderung tidak setuju, indikator menolak kebijakan pemerintah tentang penghentian pengiriman TKI cenderung setuju, indikator kognisi sikap masyarakat cenderung tidak setuju, indikator afeksi cenderung netral dan indikator konasi cenderung netral.

Kata kunci: kebijakan pemerintah, sikap masyarakat, dan TKI

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF THE GOVERNMENT POLICY REGARDING INDONESIAN MIGRANT WORKERS TERMINATION TOWARDS SOCIETY'S ATTITUDE

(Yesi Suryanti, Berchah Pitoewas, Hermi Yanzi)

The purpose of this research was to describe and analyze how the influence of government policy regarding Indonesian migrant workers termination towards society's attitude in Dusun XV, Bandar Agung, Lampung Timur. The type of this research is descriptive quantitative research that used 33 respondents as the sample. In gathering the data, this research used likert scale chief, interview, documentation, and observation. The data were analyzed using *chi kuadrat*. The result of this research, it is found that there is an oscillating degree, that is contingency coefficient with C=0.73 and contingency coefficient maximum C_{maxs} = 082 at high category with a distance interval 0.56 to 0.83.. This means that there is significant influence between government policy regarding Indonesian Migrant workers termination towards the attitude of the society in Dusun XV, Bandar Agung, Lampung Timur. Based on some indicators of government policy regarding Indonesian migrant workers termination towards the society's attitude which are: supporting the government policy regarding Indonesian Migrant workers termination indicator, tend to disagree; refussing the government policy regarding Indonesian Migrant workers termination indicator, tend to agree; society's attitude cognition indicators, tend to be agreed; affection indicator tend to be neutral, and konasi indicator tend to be neutral .

Keywords: government policy, migrant workers, society attitude.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang melimpah, namun masih kekurangan tenaga ahli dalam mengolah sumber daya alam tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rata-rata masih rendah, dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan pun masih kurang. Oleh sebab itu, Indonesia masih sangat kekurangan tenaga ahli dalam mengolah sumber daya alam yang tersedia. Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia sampai saat ini masih menjadi negara berkembang. Kurangnya kemandirian masyarakat dalam mengolah sumber daya alam, menjadi penyebab semakin banyaknya pengangguran di negara Indonesia. Hal ini tentu yang menjadi permasalahan besar yang harus diselesaikan oleh pemerintah.

Masalah pengangguran merupakan masalah utama di Indonesia yang sulit dipecahkan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran yang semakin hari semakin bertambah. Tingginya angka pengangguran di Indonesia menjadikan pemerintah menetapkan pasar kerja luar negeri sebagai alternatif strategis dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui Program Penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Perlu disadari oleh semua masyarakat khususnya keluarga maupun tenaga kerja Indonesia itu sendiri bahwa jenis pilihan penyambung keberlangsungan hidup keluarganya memiliki resiko yang tinggi.

Adanya tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri, tentu akan memberikan peningkatan devisa bagi negara yang merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Namun, tidak sedikit pula permasalahan-permasalahan yang timbul. Pada umumnya permasalahan yang lazim terjadi adalah menyangkut tentang pengiriman dan penempatan TKI ke luar negeri, khususnya tentang ketidaksesuaian antara yang diperjanjikan dengan kenyataan ditempat bekerja, serta adanya kesewenangan pihak majikan dalam memperkerjakan atau memperlakukan TKI tersebut. Selain itu, permasalahan lain yang sering terjadi adalah seputar adanya penangkapan dan penghukuman TKI yang dikarenakan ketidaklengkapan surat atau dokumen kerja, (TKI ilegal). Tentu saja, hal ini akan menimbulkan ketegangan antara pihak pemerintah Indonesia dengan negara-negara tempat tujuan TKI tersebut dipekerjakan, dan apabila didiamkan sedikit banyaknya akan menimbulkan terganggunya hubungan bilateral kedua negara yang telah terjalin baik selama ini.

Selain itu, banyak terjadi tindak kejahatan yang menimpa diri TKI seperti pelanggaran hak asasi

manusia (HAM), penganiayaan, pelecehan seksual dan juga pemerkosaan, serta pemotongan gaji oleh majikan. Melihat permasalahaan permasalahan yang ada maka dapat diambil kesimpulan bahwa permasalahan TKI di luar negeri, bukan semata-mata datang dari TKI itu sendiri tetapi juga melibatkan banyak pihak. Untuk itulah diperlukan kebijakan atau aturan yang jelas, khususnya dari negara hingga menjadi "aturan umum" yang harus dipatuhi secara bersama. Kebijakan tersebut ialah mengenai penghentian pengiriman TKI ke 19 negara Timur Tengah. Pemerintah sebenarnya sudah melakukan penghentian sementara (moratorium) pengiriman TKI ke sejumlah negara di Timur Tengah beberapa tahun lalu. Tetapi, kebijakan itu akhirnya dipermanenkan melalui Surat Keputusan (SK) Menaker yang ditandatangani pada 4 Mei 2015 dan sejak tanggal 26 Mei 2015 pemerintah telah menerbitkan Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI pada pengguna perseorangan di negara-negara kawasan Timur Tengah. Dan kebijakan tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2015.

Tujuan dari kebijakan tersebut ialah untuk membenahi sistem perlindungan para pekerja informal di luar negeri. Sehingga, tidak ada lagi TKI yang dihukum mati karena budaya negara setempat yang mempersulit tindakan perlindungan terhadap para pekerja migran yang bekerja pada sektor domestik.

Namun dari kebijakan tersebut akan timbul permasalahan yang lebih kompleks diantaranya angka pengangguran di Indonesia akan meningkat, sementara mayoritas sumber daya manusia di Indonesia masih tergolong rendah sehingga tidak mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Seperti masyarakat Desa Bandar Agung yang berlatar belakang pendidikan yang rata-rata masih rendah sehingga sulit untuk mencari mata pencaharian yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Tingkat pendidikan yang rendah mendorong para penduduk yang memasuki angkatan kerja memilih alternatif mencari lapangan pekerjaan ke luar negeri. Salah satunya di Dusun XV Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur yang memilih alternatif mencari pekerjaan ke luar negeri demi memenuhi kebutuhannya, tanpa mempertimbangkan risiko yang akan terjadi.

TINJAUAN PUSTAKA

Deskripsi Teori

Kebijakan

Menurut Suharto (2008:3), kebijakan adalah“sebuah instrument pemerintah bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan juga *governance* yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik”.

Menurut Federick dalam (Agustino,2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai:"Serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu".

Berdasarkan pendapat ahli maka menurut penulis bahwa kebijakan adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, kelompok tertentu atau pemerintah yang mengandung unsur keputusan pemilihan dari berbagai pilihan yang ada untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu dalam rangka mengatasi masalah yang ada.

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2015

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2015 yang menetapkan beberapa pertimbangan yakni:

a. Bahwa banyaknya permasalahan yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja pada pengguna perseorangan dan lemahnya jaminan perlindungan di negara-negara kawsan Timur Tengah, maka harus dilakukan penghentian dazn pelarangan penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada pengguna perseorangan di negara-negara tersebut
b. Bahwa penghentian dan pelarangan penempatan Tenaga Kerja Indonesiapada penggtvuna perseorangan di negara-negara kiawasan Timur Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Berikut ini merupakan isi dari keputusan menteri tersebut:

1. Penghentian dan pelarangan penempatan tenaga kerja Indonesia pada penggunaan perseorangan di negara-negara kawasan timur tengah (Bagian 1 Kepmenaker No. 260 Th. 2015).
2. Tenaga kerja Indonesia yang telah bekerja dinegara-negara kawasan timur tengah pada saat keputusan menteri ini diberlakukan, maka tenaga kerja Indonesia tetap dapat bekerja sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja (Bagian 2 Kepmenaker No. 260 Th. 2015).
3. Bagi tenaga kerja indonesia yang masih bekerja di kawasan timur tengah yang perjanjian kerjanya sudah berakhir masa berlakunya, tetap dapat diperpanjang (Bagian 3 Kepmenaker No. 260 Th. 2015).
4. Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri ini maka semua kebijakan yang terkait dengan penghentian penempatan

tenaga kerja Indonesia ke negara tujuan penempatan masih tetap berlaku sampai dengan diberlakukannya Keputusan Menteri ini (Bagian 4 Kepmenaker No. 260 Th. 2015).

5. Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 221 Tahun 2015 Tentang Penghentian Dan Pelarangan Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan Di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Bagian 5 Kepmenaker No. 260 Th. 2015).
6. Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2015.

Berdasarkan keputusan menteri tersebut maka menurut penulis bahwa penghentian dan larangan pengiriman TKI pada penggunaan perseorangan yaitu pekerja informal yang berprofesi sebagai pembantu rumah tangga (PRT) di Negara kawasan Timur Tengah.

Tenaga Kerja Indonesia

Menurut Pasal 1 bagian (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Sementara itu dalam Pasal 1 Kep. Manakertran RI No Kep 104A/Men/2002 tentang penempatan TKI keluar negeri disebutkan bahwa TKI adalah:"Baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI. Prosedur penempatan TKI ini harus benar-benar diperhatikan oleh calon TKI yang ingin bekerja ke luar negeri tetapi tidak melalui prosedur yang benar dan sah maka TKI tersebut nantinya akan menghadapi masalah di negara tempat ia bekerja karena CTKI tersebut dikatakan TKI ilegal karena datang ke negata tujuan tidak melalui prosedur penempatan TKI yang benar".

Berdasarkan penjelasan tentang pengertian tenaga kerja Indonesia maka menurut penulis bahwa TKI adalah setiap warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah sesuai dengan perjanjian kerja yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Sikap

Menurut Sarnoff (dalam Sarwono, 2009:81) mengidentifikasikan sikap sebagai kesediaan untuk bereaksi *(disposition to react)* secara positif *(favorably)* atau secara negatif *(unfavorably)* terhadap obyek – obyek tertentu. Menurut Djaali (2008:114) "sikap adalah kecenderungan untuk bertindak berkenaan dengan objek tertentu. Sikap bukan tindakan nyata (overt behavior) melainkan bersifat tertutup (covert behavior)." Berdasarkan pendapat di atas sikap, maka penulis menyatakan bahwa sikap merupakan penjelmaan dari paradigma yang kemudian akan melahirkan nilai-nilai yang dianut seseorang dan sikap tersebut terbentuk sepanjang

perkembangan karena sikap bukan bawaan lahir seseorang. Melainkan dari pembentukan sikap yang senantiasa berlangsung dalam interaksi manusia dan berkaitan dengan objek tersebut.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana pengaruh kebijakan pemerintah tentang penghentian pengiriman TKI terhadap sikap masyarakat di Dusun XV Desa Bandar Agung Kabupaten Lampung Timur.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah menggambarkan secara sistematik dan akurat, fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu (Sutrisno Badri, 2012:13). Pendekatan yang digunakan dalam penelititian ini adalah pendekatan kuantitatif, yang menekankan pada analisis data-data numerial (angka-angka) yang diolah menggunakan metode statistik (Sutrisno Badri, 2012:13) .

Subyek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Jika kita bicara tentang subjek penelitian, sebetulnya kita berbicara tentang unit analisis, yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti (Arikunto, 2010:188). Menurut Suharsimi Arikunto (2010:120), "apabila subjek kurang dari 100 lebih baik di ambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika jumlah subjeknya lebih dari 100 dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih".

Berdasarkan pendapat di atas, karena subyek penelitian lebih dari seratus, maka diambil sebanyak 10% dari jumlah keseluruhan yaitu 33 orang yang merupakan masyarakat Dusun XV Desa BandarAgung.

Variabel Penelitian

didalam penelitian ini terdapat 2 (dua) kelompok variabel yaitu:

a. Variabel bebas
   Yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah kebijakan pemerintah tentang penghentian pengiriman TKI (Y).
b. Variabel terikat
   Yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah sikap masyarakat (X).

Definisi Operasional

Menurut Triyono (2013:89), "Definisi Operasional adalah proses menjabarkan konsep variabel yang bersifat umum ke dalam sejumlah dimensi yang lebih konkret dan menjabarkan setiap dimensi itu ke dalam sejumlah indikator yang lebih operasional dan lebih jelas". Definisi Operasional variabel penelitian adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan pemerintah mengenai penghentian pengiriman TKI adalah kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Kebijakan ini ditujukan untuk para TKI pada

penggunaan perseorangan yang berprofesi sebagai pembantu rumah tangga (PRT) di kawasan Timur Tengah.

Adapun indikator yang dapat dijadikan tolak ukur dalam kebijakan pemerintah yaitu:

1. Mendukung
2. Menolak

b. Sikap masyarakat adalah kecenderungan yang bersifat negatif atau positif dari sekelompok manusia yang hidup di suatu wilayah yang ditandai dengan adanya hubungan sosial yang erat dan kesamaan perasaan. Secara operasional variabel dalam penelitian ini adalah sikap masyarakat terhadap kebijakan pemerintah tentang penghentian pengiriman TKI. Indikator yang diukur yaitu:
   1. Kognisi (pemahaman)
   2. Afeksi (kecenderungan emosional)
   3. Konasi (kecenderungan bertindak)

Rencana Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini variabel yang diukur adalah:

1. Kebijakan pemerintah tentang penghentian pengiriman TKI di ukur dengan indikator:
   a. Mendukung
   b. Menolak
2. Sikap masyarakat dapat diukur berdasarkan 3 dengan indikator:
   a. Kognisi (pemahaman)
   b. Afeksi (kecenderungan emosional)
   c. Konasi (kecenderungan bertindak)

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pokok

Angket

Untuk mengumpulkan data mengenai pengaruh kebijakan pemerintah tentang penghentian pengiriman TKI terhadap sikap masyarakat di Dusun XV Desa Bandar Agung menggunakan angket skala likert. Riduwan (2012:71) mengatakan "angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain yang bersedia memberikan respons (responden) sesuai dengan permintaan pengguna". Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap responden diminta untuk menunjukkan tingkatan di mana mereka setuju atau tidak setuju pada setiap pernyataan dengan 5 (lima) pilihan skala (Ahmadi, 2002:186) :

1). Sangat setuju
2). Setuju
3). Netral
4). Tidak setuju
5). Sangat tidak setuju

Teknik Penunjang

a.Wawancara

Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi yang objektif dan melengkapi data yang tidak ada dalam angket.

b.Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data berupa bahan-bahan tertulis tentang keadaan masyarakat berupa pendidikan dan keadaan ekonomi, jumlah TKI di Dusun XV Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur.

c.Observasi

Teknik ini digunakan untuk melihat keadaan tempat penelitian dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap fokus penelitian.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Untuk mengetahui tingkat validitas soal angket, peneliti melakukan

dengan cara konsultasi dengan dosen pembimbing.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam melakukan uji reliabilitas ialah:

1. Menguji coba angket kepada 10 orang diluar responden
2. Diperoleh data uji coba yaitu sebagai berikut:

$\sum X = 353$ $\sum Y = 368$ $\sum XY = 12999$
$\sum X^2 = 12499$ $\sum Y^2 = 13590$ N= 10

Berdasarkan data tersebut untuk mengetahui reliabilitas, selanjutnya dikorelasikan diolah dengan menggunakan rumus *product moment* dan dilanjutkan dengan rumus *spearman brown* untuk mencari reliabilitas alat ukur dan diperoleh koefisien korelasi dengan angka 0,94. Berdasarkan hal tersebut peneliti mengkorelasikan dengan kriteria reliabilitas dan masuk dalam kriteria Tinggi kemudian dapat dipergunakan sebagai instrument penelitian selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Indikator mendukung

Tabel 4.7. Distribusi Frekuensi Indikator Mendukung

No	KI	F	%	Kategori
1	13-14	6	18,18 %	Sangat tidak setuju
2	15-16	13	39,4%	Tidak setuju
3	17-18	10	30,3%	Netral
4	19-20	3	9,09%	Setuju
5	21-22	1	3,03%	Sangat setuju
Jumlah		**33**	**100%**	

Sumber: Analisis Data Skor Angket Penelitian 2017

Berdasarkan hasil angket penelitian dan masyarakat Dusun XV Desa Bandar Agung pada indikator mendukung cenderung tidak setuju , dengan jumlah 13 responden (39,4%), yang banyak ini terjadi karena masyarakat di Dusun XV Desa Bandar Agung tidak peduli dan tidak ikut aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah tentang penghentian pengiriman TKI sehingga masyarakat cenderung menolak karena menurut mereka, jika TKI dihentikan maka akan semakin bertambah tingkat pengangguran di Indonesia. Selain itu alasan masyarakat menolak kebijakan ini karena banyak keluarga dari masyarakat di Dusun XV desa Bandar Agung yang berprofesi menjadi TKI baik TKI di Timur Tengah maupun di negara lain.

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu responden juga mengatakan bahwa ia keberatan apabila pengiriman TKI dihentikan, karena menurutnya TKI merupakan penyumbang devisa negara terbesar, sehingga amat disayangkan apabila pengiriman TKI dihentikan. Pada dasarnya pemerintah membuat kebijakan tentu dengan mempertimbangkan dampak positif maupun dampak negatif setelah kebijakan tersebut diberlakukan. Pemerintah juga membuat kebijakan tentunya dengan maksud dan tujuan yang baik untuk kepentingan sistem politik negara. Namun dalam pembuatan kebijakan tersebut sering menimbulkan pro dan kontra serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, sebagaimana menurut Federick dalam (Agustino,2008:7) mendefinisikan bahwa kebijakan sebagai:

“Serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu

lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu".

Karena pemerintah dalam membuat kebijakan tentunya dengan pertimbangan yang matang, sebagaimana dalam isi kebijakan pemerintah tentang penghentian pengiriman TKI yang termuat dalam KEPMENAKER RI NO 260 Tahun 2015 bahwa pemerintah menghentikan pengiriman TKI dengan menimbang bahwa banyaknya permasalahan yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia yang berkerja pada pengguna perseorangan dan lemahnya jaminan perlindungan di kawasan Timur Tengah, maka harus dilakukan penghentian dan pelarangan pengiriman TKI di negara tersebut.

2. Indikator menolak

Tabel 4.8. Distribusi Frekuensi Indikator Menolak

No	KI	F	%	Kategori
1	14-15	3	9,09 %	Sangat tidak setuju
2	16-17	7	21,21 %	Tidak setuju
3	18-19	7	21,21 %	Netral
4	20-21	12	36,4%	Setuju
5	22-23	4	12,12 %	Sangat setuju
Jumlah		**33**	**100%**	

Sumber: Analisis Data Skor Angket Penelitian 2017

Berdasarkan hasil angket penelitian pada indikator menolak masyarakat cenderung setuju sebanyak 12 responden (36,4%), hal ini disebabkan karena masyarakat desa yang rata-rata berprofesi menjadi TKI merasa dirugikan dengan adanya kebijakan penghentian pengiriman TKI tersebut dan mereka mengganggap bahwa dengan pengiriman TKI dihentikan maka mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan lain serta masyarakat juga memunyai respon negatif terhadap kebijakan pemerintah tentang penghentian TKI tersebut. Hal ini terjadi karena masyarakat belum paham tentang latar belakang dan tujuan dari diberlakukannya kebijakan ini,

Pada dasarnya pemerintah menghentikan pengiriman TKI bukan tanpa tujuan, tujuannya tidak lain ialah untu kesejahteraan masyarakat di Indonesia, yaitu dengan cara melindungi TKI yang bekerja di luar negeri dari pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang kerap menimpa TKI serta masalah-masalah lain menyangkut kepentingan TKI, sebagaimana yang menurut Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia M. Hanif Dhakiri alasan kebijakan keras itu diterapkan dengan pertimbangan bahwa: "Banyak pelanggaran terkait perdagangan manusia dan norma ketenagakerjaan di 19 negara tersebut. Gaji yang rendah hingga tidak adanya perlindungan bagi TKI dalam kebijakan di negara-negara itu yang membuat pemerintah menghentikan pengiriman TKI di Negara kawasan timur Timur Tengah"(Kepnaker Nomor 260 Tahun 2015).

Dari kenyataan tersebut, maka upaya yang dapat dilakukan pemerintah

yaitu dengan cara membuka lapangan pekerjaan baru sesuai yag dijanjikan pemerintah untuk

masyarakat yang mempunyai latar belakang pendidikan yang rendah sehingga mereka tidak lagi menjadi TKI.

3. Indikator Kognisi

Tabel 4.9. Distribusi Frekuensi Indikator Kognisi

No	KI	F	%	Kategori
1	8-9	3	9,09%	Sangat tidak setuju
2	10-11	11	33,33 %	Tidak setuju
3	12-13	9	27,27 %	Netral
4	14-15	7	21,21 %	Setuju
5	16-17	3	9,09%	Sangat setuju
Jumlah		**33**	**100%**	

Sumber: Analisis Data Skor Angket Penelitian 2017

Berdasarkan hasil angket penelitian sebanyak 11 responden (33,33%), pada indikator kognisi cenderung tidak setuju hal ini disebabkan karena banyak masyarakat di Dusun XV Desa Bandar Agung tidak begitu paham tentang latar belakang dan tujuan diberlakukannya kebijakan pemerintah tentang penghentian pengiriman TKI sehingga menurut pengetahuan mereka, jika TKI dihentikan maka akan bertambah tingkat pengangguran di Indonesia. Memang benar jika pengiriman TKI dihentikan maka akan meningkatkan jumlah pengangguran di Indonesia sejalan dengan hasil penelitian yang sebelumnya yang membahas tentang dampak dari moratorium TKI di Arab Saudi. Dengan demikian tentu saja akan menambah permasalahan bagi pemerintah. Dan masyarakat pula yang akan menanggung akibat dari permasalahan tersebut. untuk itu berdasarkan hasil penelitian masyarakat cenderung tidak setuju dengan kebijakan tetang penghentian pengiriman TKI tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara kebeberapa responden sebagai penunjang dari hasil penelitian, mereka menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui tentang diberlakukan kebijakan penghentian pengiriman TKI tersebut, sehingga masih banyak TKI yang bekerja ke negara Timur Tengah. Ini membuktikan bahwa masih banyaknya PJTKI-PJTKI yang beroperasi tanpa kontrol untuk merekrut TKI illegal. Peninjauan ulang tentang tugas dan tanggung jawab PJTKI-PJTKI disetiap daerah memang perlu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan-kecurangan yang dilakukan PJTKI tersebut. Karena tanggung jawab melindungi TKI dari pra penempatan hingga purna penempatan TKI merupakan tanggung jawab dari PJTKI. Sesuai Pasal 2 PER-02/MEN/1994 untuk melaksanakan penempatan tenaga Kerja di dalam dan di luar negeri harus menaati ketentuan yang ditetapkan Menteri Tenaga Kerja. Salah satu kewajiban PJTKI yang harus ditaati ialah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja mulai dari pra sampai dengan purna penempatan, termasuk pengamanan pelaksanaan perjanjian kerja yang mengikat Pengguna Jasa TKI.

4. Indikator Afeksi

Tabel 4.10. Distribusi Frekuensi Indikato Afeksi

No	KI	F	%	Kategori
1	6-7	4	12,12%	Sangat tidak setuju
2	8-9	5	15,15%	Tidak setuju
3	10-11	14	42,42 %	Netral
4	12-13	8	24,24 %	Setuju
5	14-15	2	6,06%	Sangat setuju
Jumlah		**33**	**100%**	

Sumber: Analisis Data Skor Angket Penelitian 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada indikator afeksi terdapat 33 responden yang tergolong kategori sangat tidak setuju berjumlah 4 responden (12,12%), hal ini terjadi karena sikap masyarakat di Dusun XV Desa Bandar Agung secara afeksi terhadap kebijakan pemerintah tentang penghentian pengiriman TKI yaitu terdapat respons negatif terhadap kebijakan pemerintah tersebut, hal ini disebabkan banyaknya masyarakat di Dusun XV Desa Bandar Agung yang masih berniat menjadi TKI dan mereka sangat merasa dirugikan apabila pengiriman TKI dihentikan serta masyarakat menilai kebijakan pemerintah tentangt penghentian pengiriman TKI tidak efektif untuk melindungi TKI dari pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Kategori tidak setuju sebanyak 5 responden (15,15%), hal ini disebabkan karena sikap masyarakat di Dusun XV Desa Bandar Agung secara afeksi terhadap kebijakan pemerintah tentang penghentian pengiriman TKI yaitu terdapat respons negatif terhadap kebijakan pemerintah tersebut, hal ini disebabkan banyaknya masyarakat di Dusun XV Desa Bandar Agung yang masih berniat menjadi TKI dan mereka merasa dirugikan apabila pengiriman TKI dihentikan serta masyarakat menilai kebijakan pemerintah tentang penghentian pengiriman TKI kurang efektif untuk melindungi TKI dari pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Kategori netral sebanyak 14 responden (42,42%), hal ini disebabkan karena sikap masyarakat di Dusun XV Desa Bandar Agung secara afeksi terhadap kebijakan pemerintah tentang penghentian pengiriman TKI yaitu terdapat respons netral terhadap kebijakan pemerintah tersebut, hal ini disebabkan masyarakat di Dusun XV Desa Bandar Agung tidak begitu dirugikan apabila terjadi kekerasan yang menimpa dan masyarakat menilai kebijakan pemerintah tentangt penghentian pengiriman TKI sudah efektif untuk melindungi TKI dari pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Kategori setuju sebanyak 8 responden (24,24%), hal ini disebabkan karena sikap masyarakat di Dusun XV Desa Bandar Agung secara afeksi terhadap kebijakan pemerintah tentang penghentian pengiriman TKI yaitu terdapat respons positif terhadap kebijakan pemerintah tersebut, hal ini disebabkan ada masyarakat di Dusun XV Desa Bandar Agung tidak merasa dirugikan apabila terjadi kekerasan yang menimpa dan masyarakat menilai kebijakan pemerintah tentangt penghentian pengiriman TKI sudah efektif untuk melindungi TKI dari pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Kategori sangat setuju sebanyak 2 responden (6,06%), hal ini

disebabkan karena sikap masyarakat di Dusun XV Desa Bandar Agung secara afeksi terhadap kebijakan pemerintah tentang penghentian pengiriman TKI yaitu terdapat respons positif terhadap kebijakan pemerintah tersebut, hal ini disebabkan ada masyarakat di Dusun XV Desa Bandar Agung sangat tidak merasa dirugikan apabila terjadi kekerasan yang menimpa dan masyarakat menilai kebijakan pemerintah tentangt penghentian pengiriman TKI sudah efektif untuk melindungi TKI dari pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Berdasarkan hasil angket penelitian sebanyak 14 responden (42,42%) pada indikator afeksi masyarakat cenderung netral hal ini disebabkan karena sikap masyarakat di Dusun XV Desa Bandar Agung secara afeksi terhadap kebijakan pemerintah tentang penghentian pengiriman TKI yaitu terdapat respons netral terhadap kebijakan pemerintah tersebut, hal ini disebabkan masyarakat di Dusun XV Desa Bandar Agung kurang begitu peduli dengan banyaknya kasus kekerasan yang menimpa dan masyarakat menilai kebijakan pemerintah tentang penghentian pengiriman TKI juga kurang efektif untuk melindungi TKI dari pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Berdasarkan hasil wawancara mereka menambahkan bahwa kekerasan terjadi bergantung pada nasib dari setiap masing-masing individu. Menurut mereka jika mereka bersikap baik maka kekerasan tidak akan terjadi, begitupun sebaliknya. Mereka juga menambahkan bahwa untuk melindungi TKI tidak harus dengan cara menghentikan menghentikan pengiriman TKI tersebut, tetapi cukup dengan membenahi atau meninjau kembali kinerja PJTKI-PJTKI yang tersebar diseluruh Indonesia.

Berdasarkan pernyatan tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap masyarakat secara afeksi yang menyangkut emosional banyak ditentukan oleh kepercayaan. Bila seseorang telah memandang negatif terhadap orang lain, maka akan merasa malas dan hasilnya tidak akan sesuai dengan yang diharapkan. Sebagaimana menurut Thrustone dalam Bimo Walgito (2003:103) "sikap adalah suatu tingkatan afeksi baik yang bersifat positif maupun negatif dalam hubungan objek-objek psikologis. Afeksi yang positif ialah senang, sedangkan afeksi yang negatif ialah afeksi yang tidak menyenangkan.

5. Indikator Konasi

Tabel 4.10. Distribusi Frekuensi Indikato Konasi

No	KI	F	%	Kategori
1	6-7	1	3,03 %	Sangat tidak setuju
2	8-9	6	18,2%	Tidak setuju
3	10-11	13	39,4%	Netral
4	12-13	10	30,3%	Setuju
5	14-15	3	9,09%	Sangat setuju
Jumlah		**33**	**100%**	

Sumber: Analisis Data Skor Angket Penelitian 2017

Berdasarkan hasil angket penelitian sebanyak 13 responden (39,4%), pada indikator konasi, masyarakat cenderung netral sebanyak 13 responden (39,4%), hal ini disebabkan dengan adanya kebijakan pemerintah tentang penghentian pengiriman TKI, masyarakat di Dusun XV Desa Bandar Agung secara konasi/tindakan kurang termotivasi untuk mengenyam

pendidikan yang lebih tinggi, mereka juga kurang meyakini dengan pendidikan yang lebih akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, artinya mereka kurang mendukung upaya pemerintah melindungi TKI yang bekerja di luar negeri dengan cara memberlakukan kebijakan pemerintah tentang penghentian pengiriman TKI tersebut.

Sikap menunjukkan kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seseorang yang berkaitan dengan sikapnya terhadap objek maupun orang lain. Sebagaimana menurut Djaali (2008:114) "sikap adalah kecenderungan untuk bertindak berkenaan dengan objek tertentu. Sikap bukan tindakan nyata *(overt behavior)* melainkan bersifat tertutup *(covert behavior).*" Untuk itu pemerintah harus merealisasikan janjinya bahwa setelah pengiriman TKI dihentikan maka pemerintah harus menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang berlatar pendidikan rendah. Begitu pula dengan masyarakat, jika ada kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, mengapa tidak mengambil kesempatan tersebut. karena banyak sekali program pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan pendidikan di Indonesia.

PENGUJIAN

1. **Pengujian Pengaruh**

   Untuk mengetahui pengaruh kebijakan pemerintah tentang penghentian pengiriman TKI terhadap sikap masyarakat menggunakan rumus *Chi Kuadrat* diperoleh

   Hasil X^2 hitung = 38,4 kemudian dikonsultasikan dengan Chi Kuadrat pada taraf signifikan 5% (0.05) dan derajat kebebasan = 8 diperoleh X^2 tabel = 15,5 dengan demikian X^2 hitung lebih besar dari X^2 tabel maka hipotesis diterima maka ada pengaruh antara kebijakan pemerintah tentang penghentian pengirimanTKI terhadap sikap masyarakat.

2. **Pengujian Tingkat Keeratan Pengaruh**

   Diketahui koefisien kontigensi C= 0,73 dan C_{maks} = 0,82 maka data C_{maks} selanjutnya diklasifikasikan menjadi 3 kategori sehingga diperoleh jarak interval sebagai berikut: *I* = 0,27 Sehingga diperoleh klasifikasi atau pengkategorian, sebagai berikut:

   0,00 – 0,27 = kategori rendah
   0,28 – 0,55 = kategori sedang
   0,56 – 0,83 = kategori tinggi

   Berdasarkan pengkategorian tersebut maka koefisien kontigensi *C*= 0,73 berada pada kategori tinggi, hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh kebijakan pemerintah tentang penghentian pengiriman TKI terhadap sikap masyarakat Dusun XV Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pengujian pengaruh hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kebijakan pemerintah tentang penghentian pengiriman TKI terhadap sikap masyarakat di Dusun XV Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur. Maksudnya

pemahaman masyarakat tentang latar belakang dan tujuan diberlakukannya kebijakan pemerintah tentang penghentian pengiriman TKI kurang dipahami oleh masyarakat, akibatnya masyarakat cenderung menolak, masyarakat juga merasa dirugikan akibat diberlakukannya kebijakan tersebut, walaupun mereka juga menyadari bahwa kebijakan tersebut diberlakukan demi kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Karena banyak masyarakat yang kurang paham tentang latar belakang dan tujuan diberlakukannya kebijakan penghentian pengiriman TKI maka perlu adanya sosialisasi tentang latar belakang dan tujuan diberlakukannya kebijakan tersebut. sosialisasi ini bisa dilakukan oleh dinas tenaga kerja atau pemerintah terkait.
2. Untuk mengatasi masih banyaknya pengiriman TKI illegal maka perlu diberikan sanksi kepada Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) agar tidak melakukan kecurangan dalam pengiriman TKI dan lebih membenahi sistem kinerjanya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diembannya, tujuannya agar perlindungan TKI dari dalam negeri maupun luar negeri benar-benar ditegakkan.
3. Untuk menghindari kasus pelanggran HAM, masyarakat Indonesia khususnya perempuan hendaknya tidak pergi ke luar negeri dengan menjadi TKI informal, karena pelanggaran hak asasi manusia (HAM) lebih banyak menimpa kaum perempuan yang bekerja pada sektor formal. Jika memang harus menjadi TKI alangkah baiknya dengan cara legal, untuk memperoleh jaminan perlindungan hukum dari negara.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik.* Bandung. Alfabeta.

Djaali.2008. *Psikologi Pendidikan.* Bumi Aksara: Jakarta

Hadi, Sutrisno. 1992. *Metode Research II.* Yayasan Fakultas Psikologi UGM:Yogyakarta

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. 2015. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2015

Sarwono. W Sarlito. 2009. *Pengantar Psikologi Umum*. Depok: Rajawali Pers.

Sekretaris Negara. 2004.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.